

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL 2012

PERAN TEKNOLOGI UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN BANGSA

Yogyakarta, 13 November 2012



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Buku 2

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL 2012

PERAN TEKNOLOGI UNTUK
MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN
DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN BANGSA

Yogyakarta, 13 November 2012

Editor:

Dr. Ir. Yanisworo WR, M.Si
Ir. Sari Virgawati, M.Eng
Ir. Tutut Wirawati, M.Si
Endah Budi I., SP, MP
Vila Ratnasari L., SP
Agus Hery Muryanto, SP
Teguh Prasetyo Handiri, SP

Diterbitkan oleh:



Fakultas Pertanian
UPN "Veteran" Yogyakarta

ISBN 978-979-18768-2-7



SUSUNAN PANITIA

- Penanggung Jawab : Dekan (Dr. Ir. Abdul Rizal, AZ, MP)
Koordinator : 1. Wakil Dekan I (Ir. Budi Wdayanto, M.Si)
2. Wakil Dekan II (Ir. Sivi Hardiastuti EK, SH, MP)
3. Kaprodi Agribisnis (Dr. Ir. Nanik Dara Senjawati, MP)
4. Kaprodi Agroteknologi (Ir. Lagiman, M.Si)
5. Sesprodi Agribisnis (Agus Santosa, SP, M.Si)
6. Sesprodi Agroteknologi (Ir. Didi Saidi, M.Si)
- Ketua Pelaksana : Dr. Ir. H. Mustadjab, HK, MS
Wakil Ketua : 1. Ir. AZ Purwono BS, MP
2. Dr. Ir. Oktavia, S. Padmini, MSI
- Sekretaris : 1. Antik Suprihanti, SP, M.Si
2. Ir. Tuti Setyaningrum, Msi
3. Dra. Siti Amini, MM
- Bendahara : 1. Vini Arumsari, SP, MP
2. Wajjiono
- Sie Materi/Makalah dan Prosiding:
1. Dr. Ir. Yanisworo. W.R. MSI
2. Ir. Tutut Wrawati, MSI
3. Ir. Sari Virgawati, M.Eng
4. Endah Budi Irawati, SP, MP
- Sie Sidang dan Acara:
1. Dr. Ir. Djoko Mulyanto, MP
2. Heni Handri Utami, SP, MM
3. M. Kundarto, SP, MP
- Sie Konsumsi:
1. Ir. Dyah Arbiwati, MP
2. Ir. Heti Herastuti, MP
- Sie Usaha /Dana:
1. Drs. M. Husain Kasim, MP
2. Dwi Aulia Puspitaningrum SP, MP
- Sie Publikasi dan Perlengkapan:
1. Ir. Darban Haryanto, MP
2. Ir. Maryana, MP
- Pembantu Pelaksana:
1. Asmuri
2. Tri Jayadi
3. Sri Utami Setyawati
- Dewan Keilmuan Seminar Nasional Fakultas Pertanian:
1. Dr. Ir. H. Mustadjab, HK, MS
2. Dr. Ir. Sri Wuryani, MP
3. Dr. Ir. Juarini, MP
4. Dr. S. Setyo Wardoyo, MS
5. Dr. Ir. Sumarwoto, PS, MP
6. Dr. Ir. Basuki, MP

BUKU II

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
SUSUNAN PANITIA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
1 KEBIJAKAN PANGAN DAERAH (DIY) UNTUK MENUNJANG KEDAULATAN PANGAN DAN PEREKONOMIAN BANGSA Kepala Badan Ketahanan Pangan DIY: Ir Asikin Chalifah.....	1
2 LAREKA: LAHAN REPUNG KABUPATEN MODEL KEDAULATAN PANGAN KABUPATEN KAUR Bupati Kaur Propinsi Bengkulu: Dr. Ir Hermen Malik, M.Sc.....	11
3 PEMBERDAYAAN KOMPONEN TEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KEDAULATAN PANGAN Sri Wuryani, Mustadjab Hary Kusnadi, dan S. Setyowardoyo.....	22

I. BUDIDAYA PERTANIAN UMUM

1 INTEGRASI TANAMAN PANGAN DI AREAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT Herry Wiranata.....	I-1
2 HASIL POLONG DAN KUALITAS BIJI BEBERAPA GENOTIPE UNGGUL KACANG TANAH DITANAM PADA MUSIM KEMARAU DAN MUSIM HUJAN A. A. Rahmianna dan dan J. Purnomo.....	I-6
3 NILAI DUGA HERITABILITAS GALUR-GALUR MUTAN KACANG HIJAU (<i>Vigna radiata</i>) Apri Sulistyono dan Yuliasri.....	I-13
4 ANALISIS VEGETASI VALERIAN (<i>Valeriana javanica</i> L.) DI WILAYAH LERENG GUNUNG LAWU Bambang Pujiasmanto, Supriyono, dan Eddy Triharyanto.....	I-17
5 KERAGAAN DAN HASIL BEBERAPA GENOTIPE KACANG TANAH DI DATARAN RENDAH PADA MUSIM KEMARAU Herdina Pratiwi dan A.A. Rahmianna.....	I-26
6 KARAKTERISASI KLON-KLON UBI KAYU PLASMA NUTFAH BERPOTENSI UMUR GENJAH Kartika Noerwijati dan St. A. Rahayuningsih.....	I-34
7 PENGARUH WARNA MULSA PLASTIK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TERUNG (<i>Solanum melongena</i> L.) TUMPANGSARI DENGAN KANGKUNG DARAT (<i>Ipomoea reptans</i> Poir.) Kusumasiwi A.W.P, Sri Muhartini, Sri Trisnowati.....	I-38
8 EVALUASI PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PADI SAWAH DENGAN PENDEKATAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU DI SULAWESI TENGAH Lintje Hutahaean dan Sukarjo.....	I-46

IV. KOMUNIKASI

1	SISTEM INFORMASI TANAMAN PANGAN BERBASIS WEB DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Achwil Putra Munir , Saipul Bahri Daulay, Jon Erikson Tarigan	IV-1
2	PERAN PENDEKATAN SOSIAL KULTUR PANGAN DAN KOMUNITAS DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Budi Wdayanto.....	IV-6
3	DIFUSI INOVASI DIVERSIFIKASI PANGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN Daru Retnowati, Wita Setianingsih dan Abdul Haris S.....	IV-13 *
4	PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN KABUPATEN BLORA MELALUI PELATIHAN SISTEM INTEGRASI TANAMAN TERNAK M. Eri Wulanjari dan Bambang Supriyanto.....	IV-19
5	PERAN PENYULUH DALAM UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI MELALUI PROGRAM SLPTT DI PROMINSI NUSA TENGGARA BARAT Mardiana dan Yohanes G. Bulu.....	IV-27
6	KERAGAAN BUDIDAYA TERNAK DOMBA DENGAN MODEL PERCONTOHAN DI LAHAN MARGINAL KAB. TEMANGGUNG INTRODUCTION OF SHEEP FARMING TECHNOLOGY INNOVATION ON THE MARGINAL REGION OF TEMANGGUNG DISTRICT IN CENTRAL JAVA Rini Nur Hayati, Ulin Nuschati and Sarjana.....	IV-33
7	EVALUASI HASIL PENYULUHAN MANAJEMEN PEMELIHARAAN PUYUH (<i>Coturnix-coturnix japonica</i>) TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUDA KARANG TARUNA Rysca Indreswari.....	IV-37
8	Pemanfaatan Teknologi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani Soeharto.....	IV-41
9	RESPON PETANI TERHADAP INOVASI TEKNOLOGI PADA USAHATANI PADI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI PEDESAAN Sulamo dan Amih Prasetyo	IV-47

V. KELEMBAGAAN

1	KAJIAN MEMBANGUN KEMANDIRIAN PANGAN MASYARAKAT BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL, PROVINSI D I Y Siti Syamsiar.....	V-1
2	ANALISIS KELEMBAGAAN GAPOKTAN DALAM KEGIATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM) DI KABUPATEN GROBOGAN Arip Wijianto, Widiyanto, dan Saja anantaryu.....	V-7
3	INOVASI TEKNOLOGI DAN KELEMBAGAAN BAGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI LAHAN KERING Cahyati Setiani dan Umri Haryati	V-12
4	PEMBERDAYAAN PETANI MELALUI ACTION RESEARCH FACILITY (ARF) PENETASAN TELUR AYAM POTONG LOKAL DI FMA DESA WONOSARI,	

PERAN PENDEKATAN SOSIAL KULTUR PANGAN DAN KOMUNITAS DALAM MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Budi Widiyanto

PS Agribisnis Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta
E-mail: budiwidiyanto@gmail.com

Abstract

The Role of Food and Community Socio-Cultural Approach to Actualize the Food Sovereignty at Yogyakarta Special Region. Food sovereignty can be realized by providing a focus and priority on food policy, guarantee the right to food, and the right to determine the food system agree with the potential of local food. There are many factors that determine the direction of food sovereignty, among others: the factors of production, consumption, preferences, and social culture of the community approach. The successful achievement of food sovereignty should be able to make the creation of institutional connectivity oriented input-output balance of local food production in the community. The approach taken to give the public an opportunity to determine the food system with facility policies as a form of partisanship or community empowerment.

Keywords: social and community food culture, food sovereignty, institutional.

PENDAHULUAN

Dalam pembahasan masalah pangan, bangsa Indonesia terjebak pada pola kebijakan yang sangat berorientasi pada beras, kondisi ini dapat kita telusuri dari berbagai kebijakan yang ada sejak dijalkannya kebijakan revolusi hijau. Revolusi hijau telah menghasilkan kinerja yang populer dengan keberhasilan mencapai swa sembada beras pada tahun 1984. Namun setelah tahun tersebut persoalan beras mengalami pasang surut, bahkan pada tahun 1999 impor beras Indonesia mencapai sekitar 4,8 juta ton (Muhammad Firdaus dkk, 2008).

Dalam perjalanan perberasan nasional kebijakan impor beras selalu dilakukan dengan dalih untuk cadangan ketahanan pangan atau memperkuat stok target, meskipun target produksi terpenuhi. Misalnya pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 38,564 juta ton diatas kebutuhan beras nasional sejumlah 33,035 juta ton. Hal ini juga untuk mendukung program target surplus sebesar 10 juta ton per tahun. Persoalan beras akan selalu mengalami dinamikanya tanpa henti, karena persoalan yang melingkupi konsumsi beras belum dapat dicari solusi strategisnya.

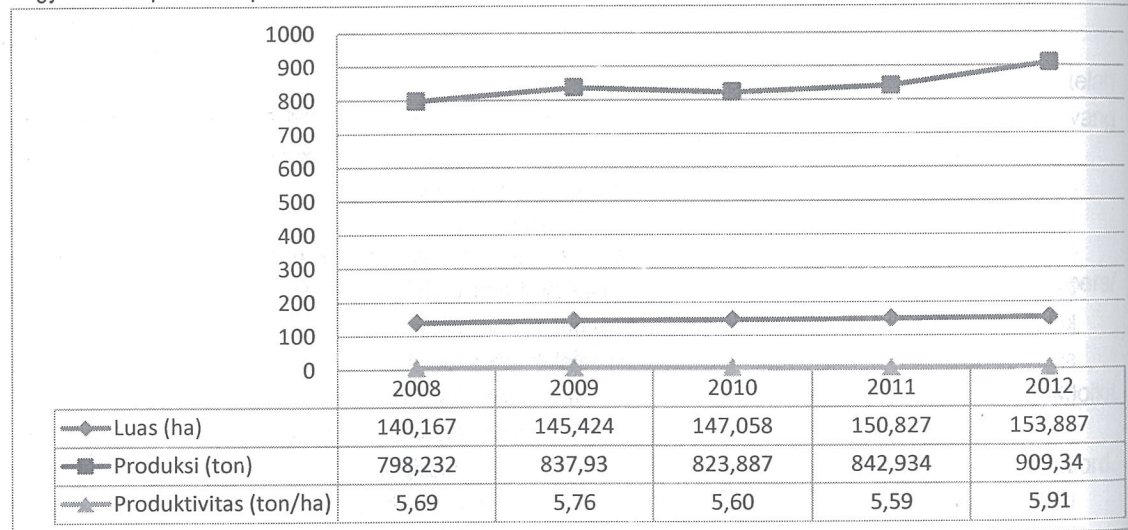
Persoalan utama ketergantungan beras menurut saya adalah pendekatan sentralistik penanganan pangan dan sangat jauh dengan potensi lokal yang ada, bahkan persoalan sosial budaya pangan kita yang cenderung bermuara pada tekanan pada beras. Persoalan lain adalah tekanan pada pangan global yang juga berpotensi pada pengalihan beras pada pola pangan berbasis gandum yang juga merupakan pangan nonlokal. Data USDA memperkirakan impor gandum Indonesia untuk tahun pemasaran 2011/2012 mencapai 7,4 juta ton, naik 12% dari tahun pemasaran 2010/2011 sebesar 6,6 juta ton (Indonesia Finance Today, 2012).

Berdasarkan fenomena tersebut nampaknya mencapai kedaulatan pangan perlu ditemukan pokok persoalan yang menyangkut pola konsumsi dan produksi dan mempertimbangkan aspek harmonisasi potensi

sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat sesuai dengan definisi kemandirian pangan. Selain itu juga dipertegas pentingnya pendekatan komunitas atau berbasis lokal sesuai juga dengan definisi tentang kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan tidak berorientasi pada pola pangan tunggal namun sangat ditentukan oleh potensi dan kehendak masyarakat lokal atau komunitas, sehingga mencapai kedaulatan pangan harus dilakukan dengan merubah kebijakan disorientasi pada pangan yang mengacu pada pasar.

Kondisi Pangan dan Kecenderungan Perubahan

Jumlah penduduk di DIY pada tahun 2011 sejumlah 3.457.491 orang, jika menggunakan angka konsumsi beras penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 93,48 kg/kapita/tahun. Dengan jumlah tersebut maka total jumlah kebutuhan beras pertahun sebesar 323.206.258,7 kg/tahun, jika menggunakan angka nasional sebesar 139 kg/kapita/tahun maka kebutuhan beras akan mencapai 480.591.249 kg/tahun. Menurut Bidang Ketersediaan Pangan /BKPP DIY dalam Ahmad Kasiyani (2012) mengatakan pada pada 2008, jumlah bulan minus ketersediaan beras masih selama 4 bulan/tahun, tahun 2012 sudah mencapai 6 bulan/tahun. Dalam jangka panjang angka produksi padi di Daerah Istimewa Yogyakarta akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan beras daerah. Data luas panen, produksi, dan produktivitas selama 2008-2012 di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Hubungan antara Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Padi Tahun 2008-2012 di DIY (Sumber: Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI)

Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa meskipun produksi meningkat tetapi terjadi stagnasi produktifitas, kondisi ini akan tertekan dengan adanya peningklatan jumlah penduduk yang diperkirakan angka pertumbuhan penduduk sebesar diatas 1% selama kurun lima tahun, laju konversi lahan sawah berkisar antara 200 – 250 ha/tahun, maka perlu dilakukan perubahan orientasi untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Langkah ini perlu dilakukan dengan adanya perubahan preferensi masyarakat untuk mensubstitusi beras pada pangan berbasis gandum. Perubahan preferensi masyarakat sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah, karena dewasa ini masyarakat cenderung berpikir secara praktis dan perubahan lebih mengacu pada orientasi pasar. Pasar telah terstruktur pada orientasi yang berpola pada ketahanan pangan, sehingga kebijakan impor sangat dominan untuk stabilitas pangan (beras). Orientasi ini telah melemahkan sendi-sendi pokok upaya mencapai kedaulatan pangan yang lebih menekankan pada kemampuan lokal dalam memenuhi konsumsi pangannya.

Dalam melakukan pilihan akan perubahan pola pangannya perlu adanya *value adjustment*, dimana pilihan harus dilihat implikasinya, sehingga kebijakan nantinya harus mempermudah masyarakat untuk merubah pola pangannya dengan pertimbangan yang lebih bernilai jangka panjang (keberlanjutan). *Value adjustment* harus didasarkan berbagai kepentingan, implikasi, dan keberlanjutannya. Berdasarkan berbagai definisi (Ahmad Suryana, 2012):

1. Ketahanan Pangan merupakan kondisi tersedianya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tecermin dari: (1) tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau; (2) untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan.
2. Kedaulatan Pangan merupakan hak Negara dan bangsa mewujudkan ketahanan pangannya: (1) dapat menentukan kebijakan pangannya sendiri; (2) menjamin hak atas pangan rakyatnya; (3) memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem usaha pangannya sesuai dengan potensi sumberdaya lokalnya.
3. Kemandirian Pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

Ada berbagai kata kunci, antara lain: ketersediaan pangan, keberlanjutan, sistem usaha pangan, dan kearifan lokal. Kata kunci tersebut mengindikasikan bahwa pangan lokal menjadi bagian yang penting dalam mengkreasikan kedaulatan pangan nasional.

Strategi Pendekatan Sosial-kultur Pangan dan Komunitas

Nasution (1985) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan wilayah ditopang oleh empat pilar, yaitu sosio-kultural, sumberdaya, ekonomi wilayah, teori lokasi. Pertimbangan tersebut didasari bahwa dalam suatu wilayah sumberdaya alam dan sumberdaya manusia menyebar secara tidak merata. Sumberdaya alam secara umum memiliki sifat yang spesifik yaitu mempunyai lokasi yang tetap ataupun sangat sukar berubah, sehingga dengan sifat tersebut sumberdaya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran manusia.

Dengan pemanfaatan yang berorientasi pada kemakmuran manusia oleh kondisi sosio-kultural wilayah. Pilar ini sangat penting karena dinamika perubahan dalam sosio-kultural wilayah sangat menentukan dukungan potensi sumberdaya alam wilayahnya. Apabila dinamika perubahan melebihi kapasitas daya dukung maka akan membuat ketergantungan akan kebutuhan dari luar wilayah, apalagi prinsip pasar memungkinkan manusia untuk menyesuaikan dengan apa yang ada di pasar. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan optimasi kapasitas sumberdaya alam lokal dan sosio-kultural wilayah.

Potensi spesifik wilayah atau kemampuan pangan lokal sangat strategis untuk digunakan sebagai saran pencapaian kedaulatan pangan. Kesulitan selama ini ditentukan oleh kebijakan yang berfokus pada pangan beras

dan mekanisme yang sangat ditentukan oleh pasar. Mekanisme pasar sangat efektif untuk pencapaian ketahanan pangan, karena kebijakan untuk mempertahankan kecukupan pangan dapat dilakukan dengan mekanisme impor pangan. Hal inilah yang menjadikan proses pencapaian kedaulatan pangan sulit dilakukan, bahkan pangan local yang seharusnya dapat dijadikan peluang untuk mendukung ketahanan pangan menjadi tidak terurus secara serius.

Untuk mencapai keberlanjutan pangan, maka perlu penerapan ilmu kesisteman. Kenyataan yang mendasar dari persoalan actual adalah kompleksitas, dimana unitnya adalah keragaman sehingga besarnya keragaman tidak mungkin diselesaikan dengan satu atau dua metode spesifik saja. Pendekatan system (*system approach*) diupayakan untuk selalu mencari keterpaduan antar bagian melalui pemahaman yang utuh, maka diperlukan suatu kerangka fikir baru (Eryatno, 2012).

Kesisteman menyangkut kegiatan produksi dan konsumsi akan suatu komoditas. Suatu wilayah dengan kemampuan memproduksi suatu komoditas dan tidak dibarengi dengan kemampuan konsumsi komoditas tersebut tentunya akan memberikan dampak yang buruk dan tidak berlanjut. Dengan adanya keseimbangan antara produksi dan konsumsi maka akan tercipta pola interaksi yang harmoni, di mana komoditas diproduksi maka komoditas tersebut dapat dikonsumsi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wilayah pengembangan komoditi, secara umum Kabupaten Sleman dan Bantul memiliki potensi pengembangan komoditi padi, Kabupaten Gunung Kidul memiliki potensi pengembangan komoditas jagung, dan Kabupaten Gunung Kidul memiliki potensi pengembangan komoditas ubi kayu. Secara rinci produksi komoditas nonberas di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul dapat dilihat pada Tabel 1.

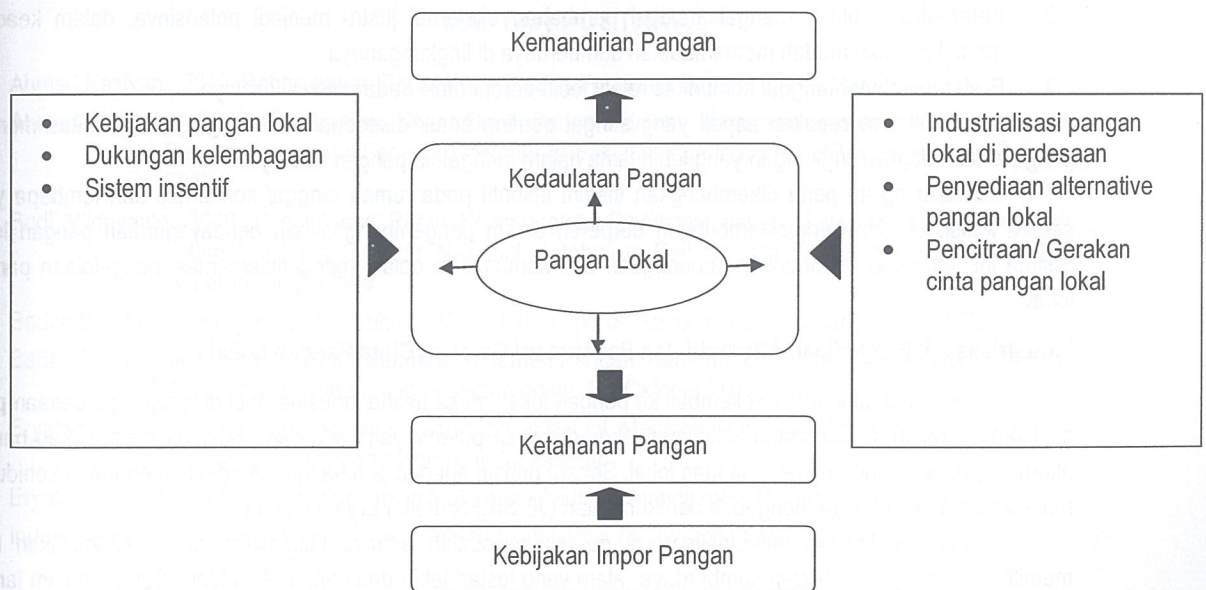
Tabel 1. Potensi Pangan Lokal Per Kabupaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011

No	Komoditas	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produktivitas	Olahan
		Ton	Ha	Ha	Kw/Ha	Tepung (kg)
Kulon Progo						
1	Ubi Kayu	28,426.88	2,236.61	2,265.60	16,252.90	933,271.30
2	Ubi Jalar	2,265.61	909.56	43.00	9,831.50	10,400.00
3	Ganyong	1,524.51	153.71	149.43	5,490.21	11,611.00
4	Garut	7,744.15	448.62	422.82	5,634.85	29,745.00
5	Gadung	1,129.32	113.82	111.02	7,061.00	100.00
6	Gembili	1,271.48	149.71	143.97	5,330.10	25.00
7	Labu Kuning	666.09	40.11	38.91	11,366.40	50.00
8	Talas	965.08	151.59	151.59	5,172.30	1,000.00
9	Uwi	1,180.36	120.02	115.22	5,842.33	25.00
10	Sukun	15,966.06	171.50	126.46	21,246.70	200.00
11	Suweg	634.61	69.43	67.92	5,661.80	50.00
Bantul						
1	Ubi Kayu	21,947.20	2,301.65	2,301.65	2,693.20	
2	Ubi Jalar	235.13	55.27	53.27	1,195.60	
3	Ganyong	311.46	17.60	17.60	309.20	
4	Garut	752.17	136.35	136.15	741.20	
5	Gadung	328.63	242.46	132.86	659.40	
6	Gembili	615.86	250.25	163.05	820.30	
7	Labu Kuning	118.60	35.11	34.11	196.00	
8	Talas	184.31	19.47	19.17	695.10	
9	Uwi	652.24	82.02	78.42	682.70	
10	Sukun	349.77	289.47	285.72	690.65	
11	Suweg	44.29	6.77	11.17	373.32	

No	Komoditas	Produksi	Luas Tanam	Luas Panen	Produktivitas	Olahan
		Ton	Ha	Ha	Kw/Ha	Tepung (kg)
Gunung Kidul						
1	Ubi Kayu	997,437.00	38,647.00	37,845.00		5,156.00
2	Ganyong	1,469.00	244.00	238.00		1,530.00
3	Garut	354.54	108.65	96.30		0.70
4	Gadung	41.00	20.00	15.00		
5	Gembili	373.00	124.00	115.00		
6	Talas	812.00	269.00	249.00		18.00
7	Uwi	615.00	197.00	179.00		
8	Suweg	26.00	16.00	11.00		

Data Kabupaten Sleman tidak tersedia
Sumber: BKPP Provinsi DIY (Diolah)

Dengan sumberdaya pangan lokal yang ada, perlu dilakukan berbagai upaya untuk menjadikannya sebagai pangan yang dapat menggantikan pangan pokok beras. Hal ini karena kebijakan pada beras telah menelantarkan pangan lokal, pengelolaan pangan lokal dilakukan kurang serius untuk menjadi bagian utuh bagi perkembangan masyarakat sehingga dapat menjadi sebuah sistem yang integral.



Gambar 2. Faktor-faktor Pencapaian Kedaulatan Pangan

Penjelasan kedaulatan pangan mengutamakan kebutuhan pangan ditentukan oleh komunitasnya (kelembagaan lokal) agar dapat mandiri dan berkelanjutan, karena kedaulatan pangan merupakan hak setiap orang untuk menentukan sistem pangan sendiri. Konsep ini seharusnya menjadi kata kunci dalam menunjang program ketahanan pangan yang menjadi orientasi pemerintah dalam setiap kebijakan pangan.

Kebijakan, Kelembagaan dan Sistem Insentif

Kebijakan perlu dilakukan secara serius untuk menempatkan pangan lokal sebagai pangan pilihan nonberas dan nongandum. Secara khusus kebijakan dapat dilakukan dengan lebih mengutamakan wilayah yang lebih mudah untuk menerapkan pangan lokal. Tentunya pola pangan di wilayah produksi pangan lokal dapat menjadi prioritas untuk memulai secara serius implementasi dalam konsumsi pangan lokal secara nyata.

Kebijakan juga harus mampu memberikan kesempatan bagi rumahtangga/ komunitas dalam mengembangkan pola produksi-konsumsi pangan lokalnya. Kelembagaan rumah tangga/ komunitas di mana produksi dilakukan dapat dijadikan sebagai wilayah basis utama perencanaan, dan secara bertahap dapat dilakukan dalam skala yang luas, baik dari aspek wilayah lebih luas maupun aspek individu stakeholder yang berperan dalam upaya pencapaian kedaulatan pangan.

Kelembagaan rumahtangga/ komunitas memiliki sosio-kultural yang lebih terpelihara secara internal dan jauh dari intervensi secara eksternal. Rumahtangga/ komunitas pada umumnya memiliki kedekatan (jarak) normatif (sosial-ekonomi) dengan lingkungannya. Jarak sosial ekonomi tersebut memberikan banyak implikasi, antara lain:

1. Rumahtangga/ komunitas akan lebih tergantung dan lebih dekat dengan lingkungannya apabila terjadi perubahan lingkungan (social ekonomi).
2. Keterbatasan untuk mengakomodasi perubahan eksternal justru menjadi potensinya, dalam keadaan memaksa akan mudah memanfaatkan sumberdaya di lingkungannya.
3. Preferensi rumahtangga/ komunitas relatif lebih berorientasi pada potensi lokalnya.

Aspek sosio-kultur merupakan aspek yang sangat penting untuk dikedepankan mengingat komunitas memiliki pengalaman adaptasi lingkungan yang lebih lama dalam mengelola pangan lokalnya.

Disamping itu perlu dikembangkan sistem insentif pada rumah tangga/ komunitas dan lembaga yang secara konsisten dan berkesinambungan berperan dalam pengembangan dan pendayagunaan pangan lokal. Sistem insentif akan memberikan kebanggaan dan kemudahan dalam mengimplementasi pengelolaan pangan lokal.

Industrialisasi, Penyediaan Alternatif dan Pencitraan/ Gerakan Cinta Pangan Lokal

Untuk memulai gerakan kembali ke pangan lokal, maka usaha industrialisasi di wilayah perdesaan perlu dilakukan. Industri di perdesaan akan mengakomodasikan potensi yang ada dan sekaligus memberikan banyak alternatif pengembangan aneka pangan lokal. Secara prinsip agenda pembangunan adalah mengubah kehidupan masyarakat, bukan hanya mengubah perekonomian (JE Stiglitz dalam Eryatno, 2011).

Dasar pentingnya industrialisasi di perdesaan adalah adanya kepemilikan lokal, kepemilikan lokal memiliki kepentingan terhadap sumberdaya alam yang lestari lebih dari kepemilikan luar. Sebab, dalam jangka panjang, kesejahteraan mereka tergantung pada keberlanjutan ekosistem. Keputusan bisnis memang selalu mengandung konsekuensi pada kehidupan sehari-hari dan juga memberikan dampak pada generasi mendatang (Eryatno, 2011).

Kepemilikan lokal harus diperluas dengan memberikan banyak alternatif dan variasi aneka pangan lokal, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mengubah preferensinya pada pangan lokal tanpa harus merasa pada posisi subordinasi dengan pangan yang lebih berorientasi pasar (beras dan gandum). Sebagai contoh, di Kabupaten Bantul saat ini berkembang jenis mi yang nongandum, antara lain miedes, mi pentil, mie letheh (bahasa lokal) tetapi konsumennya hanya terbatas lokal dan belum meluas. Namun demikian secara potensi itu ada dan perlu dukungan lebih nyata untuk mengindustrialkan produk tersebut dan produk potensi lainnya.

Dukungan lain tentunya perlu adanya kreatifitas dalam membuat pangan lokal agar lebih menarik misalnya perlu dibuat model beras analog (beras dari bahan non beras), peran keteladan dari segenap stakeholder yang memiliki kedudukan dan komitmen dalam pengembangan pangan lokal. Selain itu gerakan cinta produk pangan lokal harus selalu didorong untuk upaya pencitraan pangan lokal sehingga akan mengurangi hegemoni preferensi pada komoditas beras dan gandum.

PENUTUP

Dari berbagai definisi menunjukkan bahwa peran potensi lokal menyangkut aspek sosio-kultur yang meliputi faktor kebiasaan dan kedekatan dengan sumber pangan, dimana komunitas masyarakat melakukan substitusi pangan dan aspek komunitas menyangkut potensi modal sosial untuk bersama-sama melakukan perubahan preferensi pada nilai lokal sangat memungkinkan pencapaian kedaulatan pangan. Disamping itu peran dari kelembagaan baik secara vertikal dan horizontal untuk melakukan pendampingan dalam penguatan proses menuju kedaulatan pangan dari wilayah yang paling bawah, serta dukungan peningkatan citra pangan lokal dengan secara terus menerus menyampaikan perbaikan pandangan akan pentingnya pangan lokal dan usaha industrialisasi pangan lokal perlu dilakukan secara nyata oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kasiyani. 2012. Bahan-bahan Rapat Kerja Bidang Pertanian Bapeda DIY Tahun 2012.
- Ahmad Suryana. 2012. Percepatan Diversifikasi Pangan dalam Menopang Ketahanan Pangan Nasional. Disampaikan pada Seminar Nasional di Fakultas Agroindustri UMB Yogyakarta, 12 September 2012.
- Budi Widiyanto. 2010. Peningkatan Peran Kelembagaan Partisipasi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Prosiding Seminar Nasional Ketahanan Pangan dan Energi. Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY. 2011. Laporan Kegiatan Penyusunan Database Pangan Lokal.
- Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2012. <http://tanamanpangan.deptan.go.id/> [15 Oktober 2012]
- Eryatno. 2011. Membangun Ekonomi Komparatif. Strategi Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resiliensi Bangsa. Pt. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Eryatno. 2012. Ilmu Sistem. Meningkatkan Mutu dan Efektifitas Manajemen. Penerbit Guna Widya. Surabaya.
- Indonesia Finance Today. Impor Gandum Diperkirakan Capai 74 Juta ton. <http://www.indonesiainfincetoday.com> [10 Agustus 2012].
- Lutfi Ibrahim Nasution, 1985. Penerapan Ilmu Wilayah dalam Pembangunan Indonesia. DPP HIIPWI. Bogor.
- Muhammad Firdaus, Lukman M. Baga, Purdiyanti Pratiwi. 2008. Swasembada Beras dari Masa ke Masa. Telaah Efektifitas Kebijakan dan Perumusan Strategi Nasional. IPB Press. Bogor.